



<https://doi.org/10.56552/jisipol.v4i2.98>

Kesiapan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Mewujudkan *Smart City*

¹⁾Edward Mandala, ²⁾Tip Ilham Firman, ³⁾Dita Rosalia, ⁴⁾Dede Rasid

^{1), 2)}Prodi Ilmu Pemerintahan, STISIPOL Raja Haji

Email: edward_mandala@gmail.com

Abstract

The city government so far has carried out its duties and functions properly, based on the functions of planning, implementation and supervision but on the budget side there are still limitations and on the organizational side that has not gone well due to limited human resources which affect performance in implementing the Smart City implementation process. The purpose of this study is to determine the readiness of the Tanjungpinang city government in realizing a Smart City. The type of research conducted by researchers is descriptive qualitative research. The sampling technique used is purposive sampling. In this study, data were collected by means of interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out using qualitative analysis techniques. The results of the research show that in the field of technology, the government has developed infrastructure and public services, in the field of human resources, namely the lack of human resources in the ICT field so that the application of technology is not optimal, and in the institutional field, the direction of the central government to the Tanjungpinang city government is clearly structured. The conclusion of this study is that the city government carries out its duties and functions properly, based on the planning, implementation and supervision functions that have been running quite well even though on the budget side there are still limitations and on the organizing side that has not gone well due to limited human resources which affect performance in implementing Smart City implementation process.

Keywords: *Smart City, Readiness, Government*

Abstrak

Pemerintah Kota selama ini telah menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, berdasarkan dari fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan namun disisi anggaran masih ada keterbatasan serta pada sisi pengorganisasian yang belum berjalan dengan baik dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan proses penerapan Kota cerdas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mewujudkan Smart City. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ialah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentatif. Analisa data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bidang teknologi pemerintah sudah mengembangkan sarana prasarana dan pelayanan publiknya, bidang sumber daya manusia yaitu kurangnya sumber daya manusia pada bidang TIK sehingga penerapan teknologi kurang maksimal, dan bidang institusional bahwa arahan Pemerintah pusat pada Pemerintah Kota Tanjungpinang terstruktur secara jelas. Kesimpulan penelitian ini yaitu Pemerintah Kota menjalankan tugas dan fungsinya secara baik, berdasarkan dari fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sudah cukup berjalan baik walaupun disisi anggaran masih ada keterbatasan serta pada sisi pengorganisasian yang belum berjalan dengan baik dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang mempengaruhi kinerja dalam melaksanakan proses penerapan Kota cerdas.

Kata Kunci: *Smart City, Kesiapan, Pemerintah*



PENDAHULUAN

Konsep Smart City awalnya berkembang sejak tahun 1990-an, dimana koneksi internet mulai mengglobal sejak diperkenalkan pada tahun 1960-an (Darmawan, 2018:63). Keberadaan Smart City membuat Kota aman, nyaman, memperkuat daya saing, dan juga harus mendorong sumber daya sehingga layanan publik menghasilkan cara inovatif baru untuk mengembangkan dinamika perKotaan dan menciptakan yang berkelanjutan. Kepentingan utama untuk kelangsungan hidup masa depan Kota-Kota di daerah adalah perubahan iklim dan sumber daya. Model Kota pintar dengan lingkungan sebagai domain harus mengeksplorasi solusi inovatif dalam menggunakan sumber daya untuk memastikan bahwa Kota masa depan berkelanjutan.

Ketika mengimplementasikan konsep smart, maka perlu mengukur kesiapan dengan kemampuan pemerintah untuk menggunakan TIK secara tepat untuk memfasilitasi layanan dan kegiatan di lingkungan baru. Untuk mewujudkan penyiapan konsep Smart City negara berkembang ini, langkah pertama yang harus disiapkan adalah penyiapan teknologi. Kesadaran masyarakat adalah hal paling utama untuk mengatasi kekurangan kompetensi yang belum tuntas.

Hal-hal kecil yang biasanya dilakukan oleh pemerintah terkait yang mengelola pemerintahan dalam pelayanan memberikan peringatan untuk tidak kehilangan kesempatan untuk menerapkan Kota pintar. Pertumbuhan populasi mengubah gaya hidup penduduk, perubahan teknologi yang cepat di Kota-Kota pintar. Kehendak Pemkot menjadi acuan dalam langkah awal mewujudkan Smart City di Tanjungpinang. Secara keseluruhan, kesiapan pemerintah Tanjungpinang cukup baik. Pemerintah Kota menjalankan fungsi dan fungsinya dengan baik, berdasarkan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan cukup baik meskipun sisi anggaran masih ada batasan dan sisi organisasi belum berjalan dengan baik karena keterbatasan sumber daya. Sumber daya yang mempengaruhi kinerja dalam pelaksanaan proses pelaksanaan menerapkan cerdas.

Berkaitan dengan topik yang dilakukan oleh penelitian ini, maka perlu didukung dari penelitian-penelitian terdahulu yang membahas penelitian sejenis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Graha (2020) yang berjudul "Proses Kota Denpasar Menuju Smart City" menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian bahwa terdapat tiga tahapan yang dilakukan Kota Denpasar dalam meraih peringkat pertama Smart City, yakni tahap I pengembangan TIK, tahap II pembangunan masyarakat dan hadirnya PRO Denpasar, tahap III inovasi berorientasi Smart City. Penelitian ini juga menemukan bahwa Kota Denpasar mengembangkan dua dimensi baru, yakni smart philosophy, dan smart creativity. Dua dimensi baru

tersebut tidak terdapat pada teori atau pengembangan Smart City di Kota lainnya.(Graha, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Akbarudi Hadi (2021) yang berjudul “Implementasi Konsep Smart City Di Kota Malang Menuju Pembangunan Berkelanjutan” menggunakan metode penelitian library research, dengan hasil penelitian bahwa Indikator Smart City ada 6, yakni Smart Economy, Smart Mobility, Smart Environment, Smart People, Smart Living, Smart Governance. Keenam indikator tersebut sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Malang, ada faktor-faktor penghambat merealisasikan konsep tersebut, seperti Masih kurangnya koordinasi antar lembaga daerah, masih kurangnya SDM yang mumpuni di bidang IT, kurangnya pemeliharaan terhadap sistem aplikasi daerah yang sudah ada, kurangnya sosialisasi dan pengetahuan di masyarakat akan inovasi yang dimiliki pemerintah daerah yang sedang disusun dikembangkan.(Akbaruddin, 2021) Penelitian yang dilakukan April Insani (2017) yang berjudul “Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City” menggunakan pendekatan deskriptif, dengan hasil penelitian bahwa sebuah konsep Smart City ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dalam hal ini memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan secara maksimal secara tepat dan cepat.(Insani, 2017).

Penelitian yang dilakukan Arman (2019) yang berjudul “Smart City : Konsep Kota Pintar Di DKI Jakarta” menggunakan metode penelitian “Turunan Solusi”, dengan hasil penelitian bahwa Kota DKI Jakarta mengadopsi konsep Kota pintar, karena DKI Jakarta adalah salah satu dari Kota berkembang dunia, dengan perkembangan yang terus terjadi maka Jakarta sudah harus membuat banyak system yang akan terhubung mejadi sebuah Kota pintar, dimana Kota pintar adalah salah satu impian semua anggota masyarakat di sebuah Kota. Dengan metode adopsi dari berbagai Kota berkembang dunia lain nya, dan system yang di buat dari anak negeri yang membuat nya, produk dalam negeri merupakan hal yang membantu Kota tersebut, dengan berbagai kajian-kajian yang di buat sebelum system di terapkan, maka pro dan kontra system akan banyak berkurang. (Putra, 2019).

Penelitian yang dilakukan Suhendra & Ginting (2018) yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Membangun Smart City Di Kota Medan” menggunakan jenis penelitian Kualitatif, dengan hasil penelitian bahwa Dalam pengelolaan dan pengembangan Smart City di Kota Medan, pemerintah Kota telah mengeluarkan peraturan WaliKota Medan No 28 tahun 2018 tentang Smart City Kota Medan. Pemerintah Kota Medan juga telah membuat master plan peta jalan pembangunan Smart City untuk membangun keterpaduan antar OPD. Terdapat kendala dalam ewujudkan Smart City di Kota Medan yaitu pertama belum meratanya

nfrastruktur yang mendukung penerapan TIK di bidang Smartcity di Pemerintahan Daerah. Kedua masalah ketidaksiapan sumber daya manusia untuk memanfaatkan TIK dalam proses tata kelola dan pelayanan publik. Namun demikian berbagai upaya dalam mengatasi kendala juga telah dipersiapkan dengan memperhatikan infrastruktur dan sumber daya manusia tersebut. (et al., 2018) Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi,dkk yang berjudul “Strategi Implementasi Smart City Kota Bandung” menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan Smart City di Kota Bandung masih memiliki sejumlah permasalahan seperti Konsep Smart City yang belum tersosialisasi secara merata di masyarakatnya dan penerapan Smart City yang masih terfokus pada pembangunan teknologi, tetapi mengabaikan dimensi manusia dan institusi. Hal ini berimplikasi pada implementasi Smart City di Kota Bandung yang tidak optimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah dengan mengedepankan sinergitas dari semua sektor termasuk melibatkan partisipasi masyarakat serta melakukan perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat.(Wahyudi et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Kurnaedi,dkk (2017) yang berjudul “Penerapan “LIVE” Smart City Kota Tangerang” menggunakan metode penelitian PIECES FrameWork, dengan hasil penelitian bahwa sistem informasi LIVE yang sedang digunakan sudah memiliki beberapa kelebihan dan kekuatan yang dapat mendukung kegiatan operasional LIVE, namun terdapat juga beberapa kelemahan dan kekurangan sehingga sistem informasi LIVE masih perlu ditingkatkan.(Kurnaedi et al., 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Faidati & Khozin (2018) yang berjudul “Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (Smart City) : Studi Kasus Kota Yogyakarta” menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan hasil penelitian bahwa pengembangan Smart City di Kota Yogyakarta dilakukan dengan melanjutkan atau memanfaatkan apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terutama terkait dengan pemanfaatan TIK dalam (Faidat & Khozin, 2018) penyediaan pelayanan publik serta menjalin kemitraan dengan stakeholder lain yang memiliki keterkaitan dengan pengembangan Smart City. Penelitian yang dilakukan oleh Christianto,dkk (2016) yang berjudul “Kesiapan Kota Pekalongan Menuju Smart City” menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian bahwa Kota Pekalongan sudah siap berproses menuju Kota cerdas. Mewujudkan Kota Pekalongan menjadi Kota cerdas tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat atau hanya dibebankan pada satu/dua SKPD saja, namun menjadi tanggungjawab bersama, sehingga strategi yang ada

haruslah tertuang pada Rencana Pembangunan Kota Pekalongan baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.(Christianto et al., 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Eko,dkk (2016) yang berjudul “Strategi Pembangunan Smart City Dan Tantangannya Bagi Masyarakat Kota” menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan hasil penelitian bahwa strategi dalam pembangunan Smart City ditempuh menyesuaikan dengan segala potensi yang dimiliki dan keadaan serta kondisi di daerah masing-masing. Tantangan diterapkannya Smart City di suatu daerah antara lain: ketersediaan data dan informasi, keamanan dan privasi, investasi yang sangat besar, infrastruktur IT, adaptasi sosial dan pengembangan aplikasi.(Utomo & Hariadi, 2016).

Keterkaitan penelitian-penelitian terdahulu diatas dengan penelitian sekarang yaitu membahas kesiapan dan pelaksanaan Smart City di masyarakat Kota. Namun dalam penelitian ini peran masing-masing organisasi perangkat daerah untuk mempersiapkan *Smart City* di Tanjungpinang akan menjadi dasar awal. Bertolak dari konteks yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merasa penting untuk melakukan penelitian ini dengan judul “Kesiapan Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Mewujudkan Smart City”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan pemerintah Kota tanjungpinang dalam mewujudkan Smart City.

KAJIAN PUSTAKA

Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan (Syafiie, 2014:20).

Menurut Strong, sebagaimana dikutip oleh Syafiie (2014:20) menyatakan bahwa pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, kedalam dan keluar. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Strong, oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi negara.

Kesiapan

Tingkat kesiapan yaitu suatu pengukuran sistematis yang mendukung penilaian kematangan atau kesiapan dari suatu organisasi. Pengertian “kesiapan” Menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan antara “siap” dan “belum siap” dan “tidak siap-nya suatu organisasi (Bitjoli, dkk, 2017:2). Menurut Lou dalam jurnal

Wahid & Amalia (41:2020) “Konsep kesiapan sebagai kemampuan suatu negara, perusahaan, atau unit organisasi untuk mempersiapkan, menggunakan, dan mengambil manfaat dari adopsi inovasi baru, seperti e-business, e- government, e-procurement, e-learning, dan konsep-konsep inovasi lainnya”.

Pelayanan Publik

Pemerintah memiliki tugas pokok sebagai memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Menurut Bhrata (Maryam, 2016:8) ada empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu:

- a. Penyedia layanan;
- b. Penerima layanan;
- c. Jenis layanan;
- d. Kepuasan pelanggan.

Pelayanan publik yang dikemukakan Santosa (Agustina 2015:967) mengungkapkan bahwa “pemberian jasa secara gratis guna memenuhi kepentingan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah atau pihak”.

Smart City

Menurut Sudaryono sebagaimana yang dikutip oleh Insani (2017: 27) menyatakan bahwa “salah satu dimensi terpenting dari Smart City adalah memberikan pelayanan menggunakan teknologi terkini dan membangun infrastruktur yang pintar, sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif kepada seluruh masyarakat yang tinggal di Kota”.

Beberapa pendapat mengklaim bahwa desain Kota pintar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern dalam hal kesehatan dan bantuan kehidupan, namun ada perbedaan pandangan di antara para ahli mengenai desain Kota pintar ini, dan tidak ada pemahaman atau desain yang dapat diterapkan secara universal.

(Nadila, 2021) Kota dan pertumbuhannya masih dimasukkan ke dalam desain Kota pintar ini. Berdasarkan perspektif ilmiah masing-masing, beberapa spesialis mencoba mendefinisikan Kota pintar secara berbeda. Smart City adalah peningkatan dan penataan Kota dengan memanfaatkan teknologi agar dapat mengerti, pemahaman, serta pengendalian dari pelbagai sumber daya dari suatu Kota secara efektif dan juga efisien. Hal ini diharapkan agar pelayanan masyarakat serta pembangunan ekonomi yang terus menerus dalam dimaksimalkan (Supangkat 2015).

Menurut Washburn, D., dalam (Esabella, 2018) mengemukakan bahwa Smart City sebagai bagian dari penggunaan teknologi yang cerdas untuk mengintegrasikan berbagai komponen-komponen yang penting dari infrastruktur dan juga pelayanan disebuah Kota, contohnya pada administrasi dari Kota tersebut, pendidikan,

kesehatan, pelayanan publik lainnya, Real State, kemudian Smart City juga merupakan bagian Kota yang terdepan dimana Kota tersebut memiliki perekonomian, sumberdaya, pemerintah, lingkungan, mobilitas dan juga kehidupan masyarakat yang seluruhnya di bangun dengan cerdas. (Bonde et al., 2020).

Rancangan awal dari Smart City adalah “information city” yaitu penggunaan ICT yang menjadi media utama dari perancangan suatu Kota yang di anggap Cerdas. Sebuah Kota yang terhubung antara prasarana fisik, prasarana social dan prasarana bisnis agar tersedia pelayanan masyarakat yang berbasis prasarana teknologi untuk masyarakat. (Siregar & Darmawan, 2022) Smart City ini sudah banyak diterapkan di Indonesia, karena Indonesia berkeyakinan dengan menerapkan Smart City pemerintah daerah akan lebih baik dalam mengelola dan menghadapi tantangan di daerah perKotaan. Smart City ini juga akan membawa perKotaan yang tertata dan lebih baik kedepannya. Salah satu Kota menerapkan Smart City ialah Kota Tanjung Pinang pada tahun 2019, hal ini tercipta karena kerja sama Diskominfo Bersama kementerian lain untuk mendorong Gerakan menuju 100 smart city tahun 2019 dan Tanjung Pinang terpilih sebagai salah satu diantara 25 Kota ketiga menjadi perintis Smart City (Tim Teknis Smart City Kota Tanjung pinang, 2019). Dalam buku tersebut juga ditegaskan pemerintah Kota Tanjungpinang mendukung pembangunan nasional untuk mewujudkan smart nation yang dirangkai dari smart cities Kota Tanjungpinang melakukan akselerasi pembangunan dengan konsep pemanfaatan teknologi informasi dalam mengembangkan Tanjungpinang Smart City (Tim Teknis Smart City Kota tanjungpinang, 2019).

Carragliu dkk (Nuzir dan Saifuddin, 2015) menyebutkan bahwa Kota akan menjadi pintar apabila investasi pada sumber daya manusia, modal sosial serta infrastruktur sistem komunikasi tradisional dan modern dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kehidupan yang berkualitas dengan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, melalui tata pemerintahan yang partisipatif. Di samping itu, Cohen (2012) membagi Smart City menjadi 6 dimensi, yaitu: (1) Smart economy; (2) Smart mobility; (3) Smart environment; (4) Smart people; (5) Smart living; dan (6) Smart governance, dimana masing-masing dimensi dirinci lagi ke dalam beberapa indikator. Adapun Djunaedi (2014) menambahkan satu dimensi lagi terkait Smart City, yaitu smart disaster management terkait letak negara Indonesia yang berada di dalam ring of fire. (Darmawan, 2018).

(Insani, 2017) Akan tetapi tidak mudah mewujudkan impian Smart City tersebut dibutuhkan pemikiran strategis dan kreatif. Strategis, mengandung pengertian dikerjakan secara terencana demi masa depan (futuristic), mulai dari identifikasi masalah, pengelompokan masalah, proses abstraksi, penentuan cara dan solusi

masalah, serta perencanaan untuk implementasi (Nugraha, 2014). Kreatif, berarti kemampuan menghasilkan karya yang berguna dan baru, baik pada tataran individu maupun organisasi (Lazuardi, 2015).

METODE PENELITIAN

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti ialah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu berarti dalam penulisan ini akan membuat gambaran khusus yang berdasarkan fakta, dengan jelas tentang kejadian yang terjadi pada proses pembuatan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut J. Supranto (2004:66), “teori deskriptif diperjelas oleh berbagai cara untuk penemuan data pada instansi untuk tujuan yang tujuannya merupakan sebuah langkah yang digunakan gambarannya untuk membuat dasar yang sistematis”. Berdasarkan kata Sugiyono (2016:1), teori penulisan kualitatif adalah cara penulisan yang dikenakan untuk melihat dengan situasi teori yang alami dan tertata, dengan penulis ialah untuk instruksi utama, cara mencari fakta dibuat dengan menggabungkan pendapat yang bersifat individualistik, dengan penghasilan penulis deskriptif akan ditekankan arti mendalam oleh organisasi masyarakat. Penelitian kualitatif analisis merupakan penelitian yang menunjukkan fakta terkait perluasan masalah penelitian.

b) Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil untuk meneliti adalah bertempat di Diskominfo Kota Tanjungpinang dan Bappelitbang Kota Tanjungpinang. Alasan penulis memilih Diskominfo dan Bappelitbang Kota Tanjungpinang karena keduanya mempunyai tugas dalam membangun dan mewujudkan gerakan 100 menuju Smart City Kota Tanjungpinang, oleh sebab itu Diskominfo dan Bappelitbang Kota Tanjungpinang mempunyai informasi mendalam mengenai pembentukan Smart City di Kota Tanjungpinang, sekaligus menjadi tempat peneliti dalam mencari data dan mengumpulkan data dalam kaitan memecahkan permasalahan dalam penelitian.

c) Informan Penelitian

Teknik purposive sampling merupakan teknik untuk menentukan informan yang digunakan, teknik ini menggunakan penentuan sampel dengan pertimbangan sebagai berikut yaitu pihak yang mengetahui dan mengerti permasalahan dari penelitian ini. Dalam penelitian teknik ini adalah cara agar dapat menentukan titik utama sebagai mempertimbangkan penelitian dengan topik yang memadai pada orang yang berkopetensi dan berwawasan mengenai pemerintah dan perda.

d) Jenis atau Sumber Data

1) Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung dari responden yang berupa perkataan, tindakan, dan keterangan serta informasi-informasi. Penulis secara langsung berada dilokasi dengan langkah observasi maupun wawancara kepada informan akan mengambil data mengenai Smart City. Sumber data primer didapatkan langsung dari wawancara dengan sampel penelitian terkait kesisapan Kota Tanjungpinang dalam mewujudkan Smart City. Maka objek yang diamati dan diwawancarai adalah staff pada Dinas Kominfo Kota Tanjungpinang dan Bappelitbang Kota Tanjungpinang.

2) Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Agar pelaksanaan dilapangan terlaksana sesuai dengan yang diinginkan maka digunakan dengan beberapa cara yaitu: Observasi dan Wawancara (*Interview*).

3) Teknik Analisis Data

Menganalisis fakta berupa data kualitatif merupakan analisis fakta yang digunakan oleh penulis pada pembuatan tulisan ini, dengan step menganalisis data setelah dilakukannya pengumpulan menurut Miles dan Huberman (Simangungsong, 2016:226) yaitu:

- Reduksi data (*Data Reduction*);
- Penyajian data (*Data Display*);
- Penarikan kesimpulan / verifikasi (*Conclusion Drawing/verification*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat 68 bentuk aplikasi yang direncanakan oleh pemerintah Kota pada masing- masing OPD untuk mewujudkan bentuk Smart City Tanjungpinang. Pada Badan Kepegawaian serta Pengembangan SDM Kota Tanjungpinang aplikasi atau sistem elektronik yang direncanakan sebanyak 6 aplikasi yaitu: Absen Pemko, Aplikasi Penghitungan Nilai Pegawai, Aplikasi Surat Masuk Keluar, SIMPEG, Pelayanan Administrasi Persuratan dan Tata Naskah Dinas. Pada BPPRD Kota Tanjungpinang sebanyak 5 aplikasi yaitu: Aplikasi GIS PBB (Geographic Information System Pajak Bumi dan Bangunan) Tanjungpinang, BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) Online, IncomePoint, e-Payment, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan Online). Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang sebanyak 7 aplikasi yaitu: Aplikasi Perizinan, Arsiparis, SIMARDI (Sistem Informasi Manajemen Arsip Dinamis), SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) Elektronik, SMS Gateway, SMS Terjadwal, e-investment lounge.

Dukungan aplikasi diluncurkan guna mewujudkan Smart City di Kota Tanjungpinang, seperti yang telah disebutkan oleh Kepala Seksi Bidang E-Government dan Keamanan Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang dengan inisial MTH sebagai berikut: “Aplikasi kami luncurkan seperti Sicepat, Tanjak. siMaya MANTRA, PNSMail dan PNS Box, dll”. (wawancara tanggal 8 April 2021 di Diskominfo Kota Tanjungpinang). Selain itu, sumber daya manusia yang ada dan juga tenaga ahli tidak diberikan pelatihan dalam pelaksanaan Smart City. Hal ini menjadi salah satu penghambat pelaksanaan Smart City di Kota Tanjungpinang. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Seksi Bidang E-Government dan Keamanan Sistem Informasi Diskominfo Kota Tanjungpinang dengan inisial MTH: “Tidak ada training atau pelatihan bagi SDM. Padahal dari segi aplikasi sudah sedemikian rupa dibuat. Pelatihan yang harusnya dilakukan tidak sampai membuat banyak dana atau kegiatan. Namun tetap tidak direncanakan”. (wawancara tanggal 8 April 2021 Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang). Peran Pemerintah, merupakan Pemerintah berperan penting pada mewujudkan terciptanya Smart City melalui penetapan perencanaan, menetapkan regulasi (peraturan) yang diharapkan, merencanakan pembiayaan, membentuk sistem serta infrastruktur yang berbasis teknologi, dan melakukan pengelolaan. Pemerintah wajib mempunyai virtual serta hasrat buat membuahkan sebuah Kota cerdas, memberikan kehidupan yg berkualitas bagi masyarakatnya, dan memberikan pelayanan yg baik dan efektif pada seluruh masyarakat yang tinggal pada Kotatersebut. Berdasarkan hasil penelitian tentang Kesiapan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mewujudkan Smart City, maka dapat diketahui bagaimana kesiapan pemerintah Kota Tanjungpinang berjalan. Dan apa tujuan dari konsep Kota cerdas diterapkan di Tanjungpinang.

PENUTUP

Kesimpulan

Secara keseluruhan, Kota Tanjungpinang telah siap untuk menjadi Kota Pintar (*Smart City*). Pada bidang teknologi telah disiapkannya data center, yang berfungsi sebagai penyimpanan, pemrosesan, dan menyebarkan data jumlah besar untuk Kota Tanjungpinang, data center yang dimaksud adalah internet 20 mbps lokal 1gbps. Pada dimensi sumber daya manusia ini pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menerapkan Kota cerdas bekerjasama dengan setiap OPD dan masyarakat sebagai aktor yang berperan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan atau terwujudnya Smart City di Kota Tanjungpinang. Bentuk aplikasi yang di buat untuk masyarakat didesain sesimpel mungkin dengan menerapkan konsep paperless dan tidak perlu ada pelatihan khusus karena konsep Smart City ini sendiri memudahkan pelayanan publik untuk masyarakatnya. Pada bidang institusional bagaimana arahan

Pemerintah pusat pada Pemerintah Kota Tanjungpinang terstruktur secara jelas. Dengan adanya bimbingan teknis untuk tim pelaksana Smart City Kota Tanjungpinang, kemudian adanya masterplan Smart City Tanjungpinang sehingga kesiapan pemerintah Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan konsep Kota cerdas ini tertata dengan baik. Kemudian dukungan skema TIK dalam pengukuran kinerja dilakukan oleh pemerintah pusat, sesuai dengan mekanisme penilaian pusat, tetapi tetap ada evaluasi setiap tahunnya untuk mengetahui sejauh mana penerapan konsep Kota cerdas di Kota Tanjungpinang.

Saran

- a) Perlu adanya pengenalan konsep Kota cerdas kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa itu Kota cerdas dan apa saja bentuk inovasi-inovasi Kota cerdas.
- b) Pengukuran performa kinerja sebaiknya dimaksimalkan pada setiap OPD agar proses penerapan Kota cerdas dapat terlaksana dengan baik.
- c) Karena konsep Kota cerdas ini mengacu pada peningkatan teknologi, sebaiknya perlu adanya training atau pelatihan khusus untuk masyarakat karena tidak semua masyarakat mengetahui teknologi, demi memudahkan masyarakat menggunakan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbaruddin, F. (2021). Implementasi Konsep Smart City di Kota Malang Menuju Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Politik Integratif*, 1(1), 15–26. <http://www.jisip.org/index.php/jsp/article/view/2>
- Bonde, D. A., Priyo Purnomo, E., & Salsabila, L. (2020). Analisis Kesiapan Kota Kotamobagu dalam Mewujudkan Kotamobagu Sebagai Smart City Studi: Pemerintah Daerah Kotamobagu. *Jurnal MODERAT*, 6(1), 79–92. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/3166>
- Christianto, P. A., Nuhayati, S., Mujiyono, & Dkk. (2016). Kesiapan Kota Pekalongan Menuju Smart City. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, 11, 107–116.
- Darmawan, E. (2018). Perkembangan Smart City Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(02), 60–78.
- Faidat, N., & Khozin, M. (2018). Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (Smart City): Studi Kasus Kota Yogyakarta. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(2), 171–180. <https://doi.org/10.24905/jip.3.2.2018.171-180>

- Graha, I. M. S. (2020). Proses Kota Denpasar Menuju Smart City. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian Dan Pengembangan*, 4(2), 11. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v4i2.125>
- Insani, P. A. (2017). Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 25–31. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v2i1.1423>
- Kurnaedi, D., Informasi, S., Pgri, S., Perintis, T. J., Ii, K., & Banten, T. (2017). Penerapan “Live” Smart City Kota Tangerang. *Technology Acceptance Model*, 8(1), 18–28.
- Nadila, S. (2021). Implementasi Electronic Government Dalam Mewujudkan Good Governance Dan Smart City. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(3), 72–83.
- Putra, A. S. (2019). Smart City: konsep Kota pintar di DKI Jakarta. *Tekinfor*, 20(2), 73–79. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/TEKINFO/article/download/1168/953>
- Siregar, D., & Darmawan, E. (2022). Penerapan Smart Environment Di Pemukiman Kumuh di Kelurahan Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang. *Social Issues Quarterly*, 1(1), 232–241. <http://ejournal.umrah.ac.id/index.php/siq/article/view/23%0Ahttp://ejournal.umrah.ac.id/index.php/siq/article/download/23/21>
- Suhendra, A., & Ginting, A. H. (2018). Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Membangun Smart City di Kota Medan. *Matra Pembaruan*, 2(3), 185–195. <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.185-195>
- Utomo, C. E. W., & Hariadi, M. (2016). Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota. *Jurnal Strategi Dan Bisnis*, 4(2), 159–176.
- Wahyudi, A. A., Widowati, Y. R., & Nugroho, A. A. (2022). Strategi Implementasi Smart City Kota Bandung. *Jurnal Good Governance*, 18(1). <https://doi.org/10.32834/gg.v18i1.460>